PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/31/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015 PERIHAL PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia Nomor 18/20/DPSP, tanggal 23 September 2016)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762), dan pelaksanaan tugas menatausahakan Surat Berharga Negara dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia mengatur penggunaan nomor tunggal identitas investor untuk setiap investor Surat Berharga yang ditatausahakan di Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, meliputi Surat Berharga Negara dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga diperoleh informasi kepemilikan surat berharga yang terkonsolidasi. Oleh karena itu, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Kegiatan korespondensi terkait kegiatan penyelenggaraan BISSSS ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan korespondensi terkait kepesertaan dan operasional penyelenggaraan BISSSS ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung D Lantai 3

Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.

- b. Kegiatan korespondensi terkait pemantauan kepatuhan Peserta terhadap penyelenggaraan BI-SSSS ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.

2. Ketentuan butir III.C.12.d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - d. Surat permohonan dari pimpinan untuk membuat spesimen tanda tangan bagi:
 - 1) pimpinan atau pejabat yang berwenang; atau
 - 2) pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir c.3),
dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 8.A dalam Lampiran II.
3. Ketentuan butir III.C.12.f.2) dihapus.
4. Ketentuan butir III.D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - D. Perubahan Data-Kepesertaan
Ruang lingkup perubahan data kepesertaan meliputi:
 1. Perubahan Participant Code
Perubahan participant code dapat disebabkan antara lain karena Peserta yang bukan merupakan anggota Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-

cation (SWIFT) berubah menjadi anggota Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) atau karena adanya perubahan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Bank Identifier Code (BIC) dari Peserta.

Perubahan participant code diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan participant code kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen:
 - 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II; dan
 - 2) dokumen pendukung yang menunjukkan sebagai anggota Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) atau adanya perubahan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Bank Identifier Code (BIC) dari Peserta.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahi.
- c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan participant code melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

- d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan participant code, diatur sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat antara lain sebagai berikut:
 - a) nama Peserta;
 - b) participant code yang baru; dan
 - c) permintaan agar Peserta memenuhi kelengkapan dokumen dalam rangka permintaan Connected User dan Digital Certificate untuk participant code baru.
 - 2) Dalam rangka memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 1) c), Peserta menyampaikan surat kepada Penyelenggara yang memuat informasi:
 - a) nama Peserta;
 - b) participant code baru; dan
 - c) Certificate Signing Request (CSR) yang dihasilkan dan disimpan di media compact disc (CD) yang bersifat read only.
 - 3) Penyelenggara menyampaikan nama Connected User dan Digital Certificate baru kepada Peserta melalui sarana surat.
 - 4) Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan participant code kepada:
 - a) Peserta yang bersangkutan melalui surat; dan
 - b) seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.
 - 5) Peserta harus mengembalikan Digital Certificate Hard Token lama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Peserta menerima surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan participant code, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.

2. Perubahan Nama Peserta

Perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan nama Peserta dalam BI-SSSS kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen:

- 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II dengan menggunakan nama yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh lembaga yang berwenang; dan
- 2) fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa:
 - a) akta perubahan anggaran dasar untuk badan hukum Indonesia;
 - b) surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari lembaga yang berwenang; dan
 - c) surat keputusan dari lembaga yang berwenang tentang perubahan nama, dalam hal Peserta adalah Bank.

Bagi Bank yang berkantor pusat berkedudukan di luar negeri cukup menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c).

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
- 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahinya.

c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan nama Peserta dalam BI-SSSS melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan nama Peserta dalam BI-SSSS, Penyelenggara memberitahukan kepada:

- 1) Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan nama Peserta; dan
- 2) seluruh Peserta mengenai perubahan nama Peserta melalui administrative message atau sarana lain.

e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan nama Peserta dalam BI-SSSS, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.

3. Perubahan Kegiatan Usaha

Perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dapat menyebabkan adanya perubahan data Peserta antara lain nama Peserta, kegiatan usaha Peserta, dan/atau participant code. Perubahan kegiatan usaha Peserta diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam BI-SSSS kepada Penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 12 dalam Lampiran II.

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa:

- 1) akta perubahan anggaran dasar;
- 2) surat persetujuan perubahan ang-

- garan dasar dari instansi yang berwenang; dan
- 3) surat keputusan dari lembaga yang berwenang mengenai izin perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.
- c. Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan participant code maka Peserta harus mengajukan permohonan perubahan participant code dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahi.
 - e. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam BI-SSSS melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
 - f. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam BI-SSSS, Penyelenggara memberitahukan kepada:
 - 1) Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan dan tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta; dan
 - 2) seluruh Peserta mengenai perubahan kegiatan usaha Peserta melalui administrative message atau sarana lain.
 - g. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam BI-SSSS, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.
- #### 4. Perubahan Alamat Kantor Peserta
- Perubahan data kepesertaan yang terkait dengan perubahan alamat kantor pusat Peserta dan alamat kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan alamat kantor Peserta kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen:
 - 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II; dan
 - 2) fotokopi surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahi.
 - c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan

faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Penyelenggara mengenai:

- 1) persetujuan perubahan alamat kantor Peserta beserta tanggal efektif perubahan alamat kantor Peserta; atau
 - 2) penolakan perubahan alamat kantor Peserta beserta alasan penolakan.
5. Perubahan Lokasi SPP dan Pemandahan Jaringan Komunikasi Data (JKD) Peserta
- Perubahan lokasi SPP dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) Peserta diatur sebagai berikut:
- a. Peserta menyampaikan surat permohonan kepada Penyelenggara mengenai perubahan lokasi SPP utama, SPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD), dengan melampirkan formulir data kepesertaan dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 2 dalam Lampiran II.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahinya.
 - c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan lokasi SPP utama, SPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

- d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan lokasi SPP utama, SPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang memuat antara lain sebagai berikut:
 - 1) perubahan lokasi SPP utama dan/atau SPP cadangan Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara;
 - 2) pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data (JKD); dan
 - 3) kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait dengan perubahan lokasi SPP utama, SPP cadangan, dan/atau jaringan komunikasi data (JKD).
 - e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan lokasi SPP utama, SPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.
6. Perubahan Data Pimpinan
- Perubahan data pimpinan yang meliputi nama, kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara mengenai perubahan nama, kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 13 dalam Lampiran II.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara sebagai berikut:
 - 1) fotokopi perubahan Anggaran Dasar mengenai pengangkatan pimpinan, bagi Peserta yang berbadan hukum Indonesia;
 - 2) fotokopi bukti identitas diri pimpi-

nan, berupa:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
 - b) paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari otoritas berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA), yang masih berlaku.
- 3) Bagi pimpinan baru pada Peserta, selain memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), harus melengkapi persyaratan dokumen berupa:
- a) fotokopi surat dari lembaga yang berwenang mengenai susunan pimpinan Peserta yang tercatat pada tata usaha lembaga yang berwenang atau persetujuan fit and proper test dari lembaga pengawas yang berwenang bagi calon Direksi Bank;
 - b) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank yang berkedudukan di luar negeri kepada pimpinan kantor cabang berikut terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersumpah, bagi kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri; dan
 - c) fotokopi struktur organisasi yang masih berlaku, bagi kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.
- c. Dalam hal terdapat perubahan nama, kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan, surat permohonan perubahan data pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan surat pernyataan tetap diberlakukannya specimen tanda tangan pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 14 dalam Lampiran II.
 - d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki specimen tanda tangan di Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahi.
 - e. Dalam hal perubahan data pimpinan mencakup perubahan pimpinan baru maka pimpinan baru harus membuat specimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.
 - f. Dalam hal Peserta yang mengajukan permohonan perubahan data pimpinan merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan pimpinan baru telah memiliki specimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS maka Peserta dapat meminta penambahan kewenangan pimpinan pemilik specimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS dengan kewenangan dalam operasional BI-SSSS, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 8.B dalam Lampiran II.
 - g. Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan perubahan data pimpinan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara.

gara secara lengkap.

h. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan data pimpinan maka:

- 1) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan mengenai:
 - a) pembuatan spesimen tanda tangan bagi pimpinan baru; dan
 - b) tanggal efektif pencabutan kewenangan pimpinan dalam hal terdapat perubahan kewenangan pimpinan;
- 2) spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku efektif sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan spesimen tanda tangan.
- 3) data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pimpinan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) b) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan data pimpinan kepada Penyelenggara.

i. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan perubahan data pimpinan, Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasannya.

7. Perubahan Bank Pembayar

Perubahan Bank Pembayar diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat penunjukan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.A dalam Lampiran II; dan
 - 2) surat konfirmasi Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.B dalam Lampiran II.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki

spesimen tanda tangan di Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.; dan

2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahinya.

c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Penyelenggara mengenai:

- 1) persetujuan perubahan Bank Pembayar beserta tanggal efektif perubahan Bank Pembayar; atau
- 2) penolakan perubahan Bank Pembayar beserta alasan penolakan.

8. Perubahan Kuasa

Perubahan kuasa dilakukan dalam rangka penambahan, pergantian, dan/atau pencabutan kuasa pejabat dan/atau petugas.

Perubahan kuasa diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penambahan dan/atau pergantian kuasa pejabat, dan/atau petugas serta permintaan pembuatan spesimen tanda tangan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 15 dalam Lampiran II. ketentuan, persyaratan, dan prosedur pemberian kuasa berpedoman pada butir C.12.a dan butir C.12.c.
- 2) Pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa, menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 16 dalam Lampiran II.

- 3) Perubahan kewenangan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 7 dalam Lampiran II.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahi.
 - c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap, mengenai:
 - 1) persetujuan dan tanggal efektif penambahan dan/atau pergantian kuasa pejabat dan/atau petugas; atau
 - 2) penolakan penambahan dan/atau pergantian kuasa pejabat dan/atau petugas dengan disertai alasannya.
 - d. Dalam hal Peserta tidak mengajukan permohonan perubahan kewenangan Pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa kepada Penyelenggara maka data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan Pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
9. Perubahan Penggunaan Infrastruktur
- a. Perubahan penggunaan infrastruktur meliputi:
 - 1) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola pihak lain;
 - 2) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri; atau
 - 3) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain yang berbeda.
 - b. Prosedur perubahan data kepesertaan terkait perubahan penggunaan infrastruktur diatur sebagai berikut:
 - 1) Peserta menyampaikan surat permohonan perubahan penggunaan infrastruktur kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II;
 - b) surat pernyataan dari pimpinan yang menyatakan kesiapan infrastruktur dan memuat informasi spesifikasi infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.g; dan
 - c) dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola pihak lain maka selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), Peserta juga harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir B.3.a dan butir B.3.b.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan
 - b) bagi Peserta yang berkedudukan

di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang mewilayahi.

- 3) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi infrastruktur yang digunakan Peserta.
- 4) Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan mengenai:
 - a) persetujuan perubahan penggunaan infrastruktur Peserta beserta tanggal efektif perubahan penggunaan infrastruktur Peserta; atau
 - b) penolakan perubahan penggunaan infrastruktur Peserta beserta alasan penolakan.

10. Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan dokumen pendukung yang telah disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-RTGS sama dengan dokumen pendukung di BI-SSSS, dokumen pendukung untuk perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 dapat tidak disampaikan kepada Penyelenggara.

11. Dalam hal terdapat perbedaan tanda tangan antara yang tercantum pada identitas diri dengan yang tercantum pada spesimen tanda tangan pejabat atau petugas penerima kuasa yang ditatausahakan di Penyelenggara maka Peserta harus menyampaikan surat pernyataan perbedaan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Contoh 17 dalam Lampiran II.

5. Ketentuan butir III.F.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Kewajiban Sub-Registry

- a. Meneruskan hasil Setelmen atas transaksi Surat Berharga kepada nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen.

b. Meneruskan pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga kepada nasabah pemilik Surat Berharga pada tanggal yang sama dengan tanggal Sub-Registry menerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga dari penerbit Surat Berharga.

c. Menjamin kebenaran penatausahaan dan laporan kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah.

d. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah, dalam hal terdapat perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah.

e. Memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga rata-rata bulanan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, bagi Sub-Registry yang telah melakukan kegiatan pencatatan kepemilikan Surat Berharga di BI-SSSS lebih dari 12 (dua belas) bulan.

f. Menjaga agar posisi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) bagi Bank kustodian atau modal disetor bagi lembaga kustodian bukan Bank tidak kurang dari posisi KPM atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Mengelola dan melaporkan data nasabah secara lengkap dan benar melalui SI BI-SSSS, dengan informasi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

h. Menjaga keamanan SI BI-SSSS dan kerahasiaan data termasuk user administrator lokal yang disampaikan oleh Penyelenggara.

i. Menyediakan KPT yang paling kurang mencakup penatausahaan Surat Berharga dan penggunaan SI BI-SSSS di internal Sub-Registry antara lain mengenai pemberian akses dan pengamanan penggunaan aplikasi SI BI-SSSS.

j. Menyampaikan laporan kepada Penyeleng-

- gara dengan benar dan tepat waktu melalui SI BI-SSSS dan/atau sarana lain.
- k. Melakukan rekonsiliasi secara harian antara data Setelmen pada SI BI-SSSS dengan data Setelmen transaksi yang terjadi di Sub-Registry.
 - l. Melakukan koreksi data pelaporan melalui SI BI-SSSS, dalam hal terdapat kesalahan dan menginformasikan kepada Penyelenggara melalui surat.
 - m. Menginformasikan biaya yang akan dibebankan Peserta kepada nasabah terkait Setelmen melalui BI-SSSS secara transparan dan pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.
 - n. Melengkapi data nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan nomor tunggal identitas investor sebagaimana Single Investor Identity yang digunakan di pasar modal, dan menginformasikan nomor tunggal identitas investor tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.
6. Ketentuan butir IV.A.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. Instruksi setelmen dengan tanggal setelmen (tanggal valuta) yang jatuh pada hari Penyelenggara tidak melakukan kegiatan operasional tidak dapat dijalankan dan di-roll over ke hari kerja berikutnya.
7. Ketentuan butir IV.D.3.c.3).a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a) Penunjukan Bank Pembayar oleh Sub-Registry dan Peserta yang tidak memiliki Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan mengajukan surat penunjukan Bank Pembayar kepada Penyelenggara yang dilengkapi dengan surat konfirmasi sebagai Bank Pembayar.
8. Ketentuan butir IV.G.4.g. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- g. Pembatalan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir f.1) diatur sebagai berikut:
 - 1) Peserta mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk pelaksanaan pembatalan Setelmen second leg sebagaimana Contoh 10 dalam Lampiran II.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat didahului dengan mengirimkan administrative messages atau faksimile.
 - 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu bukti transaksi, surat kuasa dari Peserta lawan transaksi, keputusan lembaga berwenang, putusan pengadilan, dan/atau putusan arbitrase yang mengakibatkan transaksi Setelmen second leg harus dibatalkan.
 - 4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara melakukan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) atas transaksi Peserta yang bersangkutan.
 - 5) Penyelenggara menyampaikan informasi pelaksanaan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) kepada kedua belah pihak Peserta yang bertransaksi.
9. Ketentuan butir IV.I.4.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Dalam rangka penatausahaan Surat Berharga nasabah, SubRegistry mempunyai kewajiban pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Harian
 - a) Dalam hal terdapat Transaksi, Sub-Registry wajib menyampaikan laporan secara harian pada tanggal Setelmen, yang terdiri atas:
 - (1) Laporan Setelmen transaksi antar nasabah dalam Sub-Registry yang sama (inhouse transfer); dan/atau
 - (2) Laporan informasi data nasabah atas Setelmen transaksi Surat Berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS.
 - b) Laporan Harian disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - 2) Laporan Bulanan
 - a) Laporan Bulanan memuat informasi posisi kepemilikan Surat Berharga nasabah Sub-Registry pada akhir bulan.

- b) Laporan Bulanan disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- 3) Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat Berharga
 - a) Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat Berharga memuat informasi hasil Setelmen transaksi penerbitan Surat Berharga atas nasabah yang tercatat di Sub-Registry.
 - b) Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- 4) Laporan Setelmen Transaksi Buyback/Debt Switching
 - a) Laporan Setelmen Transaksi Buyback/Debt Switching memuat informasi hasil Setelmen transaksi buyback/debt switching atas nasabah yang tercatat di Sub-Registry.
 - b) Laporan Setelmen Transaksi Buyback/Debt Switching sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- 5) Laporan Data Nasabah
 - a) Sub-Registry harus menyampaikan Laporan Data Nasabah untuk pengisian database nasabah di SI BI-SSSS, yang berisi:
 - (1) data nasabah baru; dan/atau
 - (2) perubahan data nasabah.
 - b) Dalam hal nasabah tidak terdaftar dalam database nasabah di SI BI-SSSS maka Sub-Registry dianggap tidak menyampaikan Laporan Harian.
 - c) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- 6) Laporan lainnya

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Sub-Registry untuk menyampaikan laporan lainnya.

- 10. Ketentuan butir XI.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 4. Ketentuan mengenai kewajiban Peserta menyampaikan laporan berkala berupa LHPK sebagaimana dimaksud pada butir VIII.6.a.1) mulai berlaku untuk periode laporan tahun 2016.
- 11. Ketentuan butir XI.5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
 - 5. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan harian sebagaimana dimaksud pada butir IX.4.a, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.
- 12. Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

BRAMUDIJA HADINOTO

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)